

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

## **. Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH)**

Berdasarkan hasil pemantauan harga bahan pokok penting selama **Triwulan IV Tahun 2025 (Oktober-Desember 2025)**, tercatat pergerakan **Indeks Perkembangan Harga (IPH)** Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:

- **Oktober 2025**

IPH menunjukkan tren deflasi berturut-turut sejak Minggu ke-1 hingga Minggu ke-5, dengan nilai terendah terjadi pada Minggu ke-4 sebesar **-1,01%**. Kondisi ini mengindikasikan penurunan harga yang relatif merata pada beberapa komoditas pangan utama.

- **November 2025**

IPH berbalik mengalami inflasi moderat, dengan kisaran **0,65%-0,87%**, mencerminkan mulai terjadinya peningkatan permintaan dan kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis, namun masih dalam batas yang terkendali.

- **Desember 2025**

IPH mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Pada Minggu ke-2 hingga Minggu ke-4, IPH tercatat masing-masing sebesar **1,58%**, **1,89%**, dan **1,89%**, yang menunjukkan tekanan inflasi yang perlu diwaspadai.

## **2. Evaluasi Stabilitas Inflasi (Early Warning System)**

IPH merupakan **indikator proksi inflasi** yang digunakan sebagai **early warning system** untuk memantau dinamika harga bahan pokok penting secara mingguan. Mengacu pada **sasaran inflasi nasional Bank Indonesia sebesar  $2,5\% \pm 1\%$** , maka batas aman pergerakan IPH berada pada rentang  **$\pm 1,5\%$** .

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- Secara umum, **pergerakan IPH Triwulan IV Tahun 2025 berada dalam kategori aman dan terkendali.**
- **Pengecualian terjadi pada Minggu ke-2 hingga Minggu ke-4 Desember 2025**, di mana IPH melampaui batas kewaspadaan.
- Peningkatan tersebut erat kaitannya dengan **meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026**, yang secara historis selalu memicu tekanan harga pangan.

## **3. Komoditas Penyumbang Andil IPH**

Berdasarkan data **andil komoditas terhadap IPH dari BPS**, diketahui bahwa pergerakan IPH selama Triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama sebagai berikut:

### **1. Oktober 2025 (Tekanan Deflasi)**

Komoditas utama penyumbang penurunan IPH:

- **Cabai Rawit**
- **Daging Sapi**

## **Beras**

Penurunan harga cabai rawit menjadi faktor dominan deflasi, mengindikasikan pasokan yang relatif melimpah pada periode tersebut.

### **1. November 2025 (Inflasi Moderat)**

Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH:

- **Cabai Merah**
- **Bawang Merah**
- **Telur Ayam Ras**
- **Minyak Goreng**

Kenaikan harga bersifat gradual dan mencerminkan normalisasi harga setelah periode deflasi Oktober.

### **1. Desember 2025 (Tekanan Inflasi Tinggi)**

Komoditas utama penyumbang lonjakan IPH:

- **Cabai Rawit**
- **Bawang Merah**
- **Beras**

Cabai rawit menjadi komoditas dengan andil terbesar secara konsisten, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan pasokan dan permintaan menjelang HBKN.

### **4. Komoditas Strategis Penyumbang IPH Triwulan IV 2025**

Secara agregat, komoditas yang secara konsisten memberikan kontribusi terhadap pergerakan IPH Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

1. Cabai Rawit
2. Cabai Merah
3. Bawang Merah
4. Beras
5. Daging Sapi
6. Telur Ayam Ras
7. Minyak Goreng

Komoditas-komoditas tersebut merupakan **bahan pangan strategis** yang memiliki bobot tinggi dalam pembentukan inflasi daerah serta sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, distribusi, dan ekspektasi pasar.

## **2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.**

### **1. Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura**

- Komoditas cabai merah maupun cabai rawit menjadi permasalahan harga yang fluktuatif dibandingkan dengan komoditas lainnya.
- 8 Dua komoditas tersebut menjadi penyumbang andil perubahan IPH yang paling

signifikan

## 2. Ketergantungan pada Pasokan Eksternal

- Beberapa komoditas utama (bawang merah, bawang putih, cabai) **belum sepenuhnya dipenuhi oleh produksi lokal**, melainkan didatangkan dari provinsi lain.
- Hal ini menyebabkan **kerentanan terhadap gangguan distribusi**, cuaca, dan biaya logistik antar wilayah.

## 3. Keterbatasan Fasilitas Distribusi dan Logistik

- **Akses jalan dan rantai pasok yang belum optimal** di beberapa kecamatan (terutama pada beberapa wilayah yang rawan bencana longsor ataupun putus jalan terutama ketika cuaca buruk) membuat distribusi bahan pangan tidak efisien.
- Akibatnya, harga di tingkat konsumen lebih mudah naik saat terjadi gangguan pasokan atau cuaca buruk.

## 4. Minimnya Diversifikasi Sumber Pangan Lokal

- Produksi pangan lokal masih terbatas pada komoditas tertentu (beras, jagung, hasil laut), sementara kebutuhan konsumsi hortikultura sebagian besar berasal dari luar daerah.
- Hal ini menyulitkan **intervensi harga secara langsung** di pasar lokal.

## 5. Belum Optimalnya Sinergi dan Data Pemantauan Harga

- Walaupun sudah ada sistem **Panel Harga Pangan**, koordinasi antar OPD dan pelaku pasar **masih reaktif**, belum berbasis pada data prediktif.
- Respons kebijakan (seperti operasi pasar atau distribusi pasokan) sering dilakukan **setelah harga naik**, bukan secara antisipatif

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- **Koordinasi lintas sektor** dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam rangka memantau perubahan harga secara real time secara harian dan memastikan tidak adanya lonjakan harga yang membuat guncangan terhadap ekonomi daerah;
- **Operasi Pasar dan Pasar Murah** dilaksanakan di beberapa kecamatan (Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, dan Lemong) pada bulan Agustus, menargetkan komoditas strategis seperti beras;
- TPID Kabupaten Pesisir Barat bersama OPD terkait telah melakukan kegiatan seperti operasi pasar murah serta penyebaran himbauan belanja secukupnya dalam rangka menekan harga pangan;
- TPID aktif berpartisipasi dalam **High Level Meeting** dan Rakor mingguan bersama Bank Indonesia, BPS, dan Satgas Pangan.

## 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## Permasalahan dan Kendala

### 1. Produksi dan pasokan belum stabil.

- Ketergantungan pada musim tanam serta terbatasnya sarana pascapanen dan penyimpanan (cold storage).

### 2. Distribusi masih terkendala infrastruktur.

- Kondisi jalan dan transportasi antar kecamatan menyebabkan biaya logistik tinggi.

#### **Koordinasi lintas OPD belum optimal.**

- Masih terdapat duplikasi data dan keterlambatan laporan harga harian.

#### **4. Keterbatasan dukungan anggaran.**

- Anggaran TPID belum dialokasikan secara khusus dan berkelanjutan dalam APBD.

#### **5. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem.**

- Mengganggu pola tanam dan berdampak terhadap fluktuasi harga pangan.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah secara umum berjalan efektif, dengan capaian stabilitas harga yang terjaga serta koordinasi lintas sektor yang semakin baik. Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam hal integrasi data harga dan stok, penguatan kerja sama antar daerah, serta dukungan anggaran TPID yang lebih memadai.

#### **5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

### **Stabilisasi Pasokan dan Distribusi Pangan**

- **Kebijakan:** Perkuat kerja sama lintas kecamatan dan lintas OPD (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan) dalam pengawasan distribusi bahan pangan utama.
- **Tindakan rekomendasi:**
  - Bangun sistem *early warning* pasokan pangan berbasis harga harian (integrasi dengan Panel Harga dan media sosial Pemkab).
  - Bentuk "*Satgas Distribusi Pangan*" sementara saat cuaca ekstrem untuk wilayah sulit (Krui-Ngambur-Pulau Pisang).
  - Koordinasi dengan Bulog Liwa untuk memperkuat ketersediaan beras SPHP di kecamatan pesisir.
- 2. Penguatan Cadangan dan Ketahanan Pangan Lokal**
  - **Kebijakan:** Optimalkan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber karbohidrat (singkong, jagung, pisang).
  - **Alasan:** Ketergantungan pada pasokan beras dari luar kabupaten menimbulkan risiko saat transportasi laut/antar kecamatan terganggu.
  - **Tindakan rekomendasi:**
    - Revitalisasi **lumbung pangan desa**.
    - Program substitusi pangan lokal melalui edukasi "*Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)*".
    - Penguatan kerja sama dengan kelompok tani untuk stok panen cadangan.

### **Operasi Pasar dan Subsidi Transportasi**

- **Kebijakan:** Intensifkan operasi pasar murah dan beri subsidi biaya transportasi untuk bahan pokok antar kecamatan saat harga melonjak.
- **Alasan:** Data triwulan III menunjukkan kenaikan harga beras, cabai, dan ayam ras mencapai puncak di Agustus 2025.
- **Tindakan rekomendasi:**
  - Laksanakan operasi pasar di kecamatan dengan kenaikan harga tertinggi (Krui, Lemong, Pesisir Tengah).
  - Pertimbangkan pemberian insentif transportasi logistik bagi pedagang kecil yang mengangkut bahan pokok ke wilayah pesisir.

## Edukasi Konsumen dan Digitalisasi Informasi Harga

- **Kebijakan:** Edukasi masyarakat mengenai belanja bijak dan pilihan substitusi pangan melalui media digital.
- **Alasan:** Masih rendahnya literasi harga masyarakat menyebabkan perilaku *panic buying* saat harga naik.
- **Tindakan rekomendasi:**
  - Kembangkan akun “*Info Harga Pangan Pesibar*” di media sosial Pemkab yang menampilkan data real-time dari Panel Harga.
  - Lakukan sosialisasi bersama TPID dan Dinas Ketahanan Pangan di pasar tradisional setiap bulan.

## Peningkatan Infrastruktur Distribusi

- **Kebijakan:** Prioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jalan penghubung produksi-pasar, terutama di wilayah pesisir dan perbukitan.
- **Alasan:** Jalur Krui-Ngambur menjadi titik krusial distribusi hasil pertanian; kondisi jalan yang rusak memperlambat pasokan.
- **Tindakan rekomendasi:**
  - Sinkronisasi rencana peningkatan jalan pertanian dengan Dinas PUPR.
  - Usulan pembangunan *dermaga mini logistik* untuk Pulau Pisang guna menjaga rantai pasok.

## Koordinasi dan Sinergi Lintas Instansi

- **Kebijakan:** Tingkatkan peran TPID sebagai forum koordinasi lintas sektor.
- **Alasan:** Pengendalian inflasi memerlukan pendekatan lintas fungsi
- **Tindakan rekomendasi:**
  - Integrasi data dari BPS, Bulog, Dinas Pertanian, dan Dinas Perhubungan dalam dashboard pemantauan harga daerah.

## Kolaborasi dengan UMKM dan BUMDes

- **Kebijakan:** Libatkan BUMDes dan UMKM sebagai mitra stabilisasi harga pangan lokal.
- **Alasan:** Banyak UMKM bahan pangan di Pesibar yang bisa berperan menahan harga di tingkat lokal.
- **Tindakan rekomendasi:**
  - Fasilitasi BUMDes sebagai distributor alternatif bahan pokok di wilayah terpencil.
  - Pelatihan digital marketing bahan pangan lokal agar rantai distribusi lebih efisien.